



VOL. 7 No. 2 OKTOBER 2010-MARET 2011

ISSN. 1693-9204

Visi Publik

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

**ANALISIS PENCAPAIAN KOMPETENSI PENDIDIKAN NERS
SEBAGAI PENDIDIKAN PROFESI DI PROGRAM STUDI ILMU
KEPERAWATAN FK-UGM**

**FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH**

**ANALISIS KINERJA FUNGSI ADMINISTRASI UMUM
KABUPATEN BREBES**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PADAT
KARYA PANGAN (PKP) DI DESA WIRASABA KECAMATAN
BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM -MANDIRI PERDESAAN
DI DESA PERNASIDI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN
BANYUMAS**

**SURVEY INDEKS KEPUASAN PUBLIK ATAS FASILITAS PASAR
UNTUK MERIVITALISASI PASAR BERBASIS PUBLIC AS
PUBLIC**

**PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT
(Kajian Terhadap Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam
Menemukan Basis Ekonomi)**

**FAKTOR-FAKTOR KUALITATIF PENENTU DAYA SAING
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ISSN 1693-9204



9

771693

920487

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDRIMAN
PURWOKERTO**

VISI PUBLIK

JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab :

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman**

**Ketua Dewan Penyunting :
Dwiyanto Indiahono, M.Si**

Sekretaris :

Hikmah Nuraeni, MPA

Dewan Penyunting :

Prof. Marion R. Finley (Universitas Asahi, Jepang)

Prof. Drs. J. Warella, MPA, Ph.D (UNDIP)

Prof. Dr. Jeremias T. Keban, M.U.R.P (UGM)

DR. Fauzy Ammary (Dainichi Consultant, Jepang)

Prof. Dr. Eko Prasajo (UI)

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA (UI)

Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko (Unsoed)

Dr. Ali Rokhman (Unsoed)

Dr. Slamet Rosyadi (Unsoed)

Redaksi Pelaksana

Tobirin, M.Si

Staf Redaksi :

Denok Kurniasih, M.Si

Tri Yumarni, M.Si

Musri Khoerudin

Alamat Redaksi :

Jurusan Ilmu Administrasi negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Kampus Grendeng. JL. HR. Boenyamin, Purwokerto

Telp (0281) 68034 ; Fax (0281) 641418

e-mail : visipublik@yahoo.com

Terbit pertama kali : April 2004

Frekuensi terbit : 2 kali setahun pada bulan April dan Oktober

VISI PUBLIK

JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
ANALISIS PENCAPAIAN KOMPETENSI PENDIDIKAN NERS SEBAGAI PENDIDIKAN PROFESI DI PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FK-UGM (Hikmah Nuraini dan Budi Harjanto)	249-257
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH (Andi Antono)	258-266
ANALISIS KINERJA FUNGSI ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BREBES (Muslih Faozanudin)	267-276
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PADAT KARYA PANGAN (PKP) DI DESA WIRASABA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA (Titi S)	277-283
IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM - MANDIRI PERDESAAN DI DESA PERNASIDI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (Bahtarudin)	284-293
SURVEY INDEKS KEPUASAN PUBLIK ATAS FASILITAS PASAR UNTUK MERIVITALISASI PASAR BERBASIS PUBLIC AS PUBLIC (Dwiyanto Indiahono)	294-303
PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT (Kajian Terhadap Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas Dalam Menemukan Basis Ekonomi) (Rukna Idanati)	304-314
FAKTOR-FAKTOR KUALITATIF PENENTU DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANYUMAS (Mahmud Setiahad)	315-322

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga Jurnal Visi Publik Volume 7 No. 2 Edisi Oktober 2010-Maret 2011 dapat di terbitkan. Pada Edisi kali ini Jurnal Visi Publik memiliki perhatian permasalahan manajemen pembangunan dan kebijakan publik di tingkat lokal. Lokalitas permasalahan dan upaya pemecahan masalah di bidang publik memiliki tingkat keunikan tersendiri dilihat dari berbagai alternatif kebijakan yang diambil. Permasalahan pendidikan, administrasi, pelayanan publik, indeks kepuasan publik, ekonomi rakyat dan daya saing daerah, menjadi bahasan jurnal pada terbitan edisi ini.

Dalam penerbitan jurnal Visi Publik Vol 7. No. 2 ini, Redaksi berterimakasih kepada para penulis dari berbagai pakar keilmuan Administrasi publik untuk memberikan hasil pemikirannya dalam bentuk artikel dan hasil penelitian. Redaksi kembali mengundang pada para pakar, dosen, praktisi untuk menyumbangkan pemikirannya untuk penerbitan jurnal berikutnya. Yaitu Jurnal Visi Publik Vol 8 No. 1 edisi April 2011-September 2011. Atas perhatian dan kerjasamanya dalam penerbitan Jurnal Visi Publik kami ucapkan terima kasih.

Redaksi

**ANALISIS KINERJA FUNGSI ADMINISTRASI UMUM
KABUPATEN BREBES**

**PERFORMANCE ANALYSIS ON GENARAL ADMINISTRATIVE
FUNCTION OF BREBES REGENCY**

Oleh: Muslih Faozanudin
Jurusan Ilmu Adminsitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Soedirman
(Diterima: 5 Agustus 2010, disetujui 22 September 2010)

ABSTRACT

Performance appraisal of public organization is crucial issues to know the 'degree of accomplishment about what had been planed. Performance is the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period'. It is the state of condition about the process of work in achieving planned thing. This reasearh used descriptive approaches, especially quantitative technique. The research showed that the performance of general administration of Brebes Government was categorized by average or quite success, by the gained score was 56,59 percent. this condition was in line with the score achieved by the parameters. The gained score of parameter of clean, transparent and accountable administration' had the lowest score, 42 percent, followed by administrative procedure implementation parameter, which gained score of 47. Based on that result those parameters were still necessary to be concerned, especially for improving performance of information and communication functions

Keywords: *general administration, government performance*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, dan diguliskannya model Desentralisasi penilaian kinerja pemerintah daerah merupakan isu yang menarik dan penting, khususnya bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan dilakukannya evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah, maka dapat diketahui seberapa jauh prestasi dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai, dalam rangka memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Untuk kepentingan tersebut, Lembaga Administrasi Negara juga telah

menerbitkan Buku Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Pada dasarnya kinerja merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian kinerja merupakan dan interpretasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. kinerja sering diartikan sebagai 'penampilan' atau prestasi kerja, ujuk kerja, tampilan hasil kerja, pencapaian memperoleh hasil kerja, atau tingkat

a t a u t i n g k a t kecepatan/efisiensi/produktivitas/efektifitas dalam mencapai hasil kerja (BPK, 2002:3) konsep ini juga menunjukkan “*The execution or Fulfillment of duty*’ atau *a Person’s achievement under test condition etc.* (Oxford Dictionary, 1998:606). Atau *’degree of accomplishment* (Keban:2004:192).

Selanjutnya Bernaddin dan Russel (dalam Keban, 2004) mengartikan kinerja sebagai *’the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period’*. Dengan demikian kinerja merupakan *state of condition* dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Purwosentoro, 1999:2, LAN, 2003:3)

Menurut Swanson dan Holton, (dalam Keban:2004:193) ada tiga tingkatan dalam menilai kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Menurutnya, kinerja organisasi dapat menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut dapat mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerja terdahulu (*previous performance*) dibandingkan dengan organisasi lain (*benchmarking*), dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yg telah ditetapkan. (Encyclopedia of Public

Administration and Policy, dalam Callahan, 2003:911). *K i n e r j a p r o s e s* menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang dalam organisasi memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya dan tujuan para individu; sedangkan kinerja individu mempersoalkan apakah tujuan atau misi individu sesuai dengan misi organisasi, apakah individu mengalami hambatan dalam bekerja, dan mencapai hasil, apakah para individu memiliki kemampuan mental, fisik dan emosi dalam bekerja; dan apakah mereka memiliki motivasi yang tinggi, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam bekerja. Dalam kajian ini, konsep kinerja lebih dititik beratkan pada tingkatan organisasi, sehingga lebih menggambarkan pada pendeskripsian kinerja secara makro organisatoris, dalam mencapai tujuan/sasaran organisasi. Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja organisasi adalah, pencapaian hasil kerja, prestasi kerja dari organisasi pemerintah kabupaten dalam periode kurun waktu tertentu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan.

Untuk mengukur suatu kinerja, secara umum, ada dua pendekatan yang telah dikembangkan untuk menilai kinerja, yaitu pendekatan yang menilai perilaku atau *pendekatan perilaku*, dan pendekatan yang menilai hasil dan manfaat yang diberikan atau *pendekatan hasil*. (Keban, 2004:204)

Pendekatan perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pekerjaan seseorang, yang lebih menekankan pada *quality of task oriented*. Dengan demikian pendekatan ini melihat perubahan perilaku, pengembangan metode

dan teknik yang digunakan, sebagai pusat perhatian utama dalam peningkatan kinerja.

Pendekatan hasil mempelajari apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tuntutan dari pihak yang membutuhkan dan telah diberikan dengan kualitas terbaik atau didistribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Dalam pendekatan ini, kesesuaian antara nilai yang hendak dihasilkan dan didistribusikan, dengan nilai pihak yang membutuhkan, serta kualitas dari cara memberi dan mendistribusikan nilai tersebut, merupakan pusat perhatian. Bahkan, pada perkembangan terakhir, orientasi kualitas benar-benar ditekankan karena adanya tuntutan publik akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di sektor publik secara prima.

Dalam pendekatan hasil, yang dinilai adalah ketepatan hasil sesuai dengan harapan atau rencana, atau yang disebut dengan *efektivitas*, (*effectiveness perspective*). Parameter utama yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah hasil apa dan berapa yang dapat dinikmati, siapa yang mengambil manfaat, dan berapa yang dapat menikmati hasil tersebut (ketepatan, jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau), kapan dinikmati (ketepatan waktu) dan dimana dinikmati (ketepatan lokasi). Disamping adanya kriteria di atas, parameter lain yang telah dikembangkan adalah mencoba mengukur cara memberikan barang dan jasa kepada kelompok sasaran (pelanggan dan masyarakat) atau yang disebut dengan kriteria kualitas (*quality perspective*). Kriteria ini telah menjadi semakin penting bagi institusi/lembaga dan

aparat yang bekerja dan terlibat dalam pelayanan publik. Penggunaan perspektif kualitas tersebut merupakan perubahan yang sangat penting.

Menurut Keban (2004), kombinasi pendekatan penilaian kinerja di atas telah direpresentasikan dalam nilai-nilai *good governance* yang saat ini telah menjadi nilai yang hendak diterapkan dalam semua tataran pemerintahan termasuk pemerintah daerah/kabupaten. Dengan demikian perlu upaya mengakomodasikan nilai-nilai tersebut kedalam standar penilaian kinerja pemerintahan baik menyangkut aparturnya, lembaganya maupun program serta kebijakan-kebijakannya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan cenderung menggunakan kombinasi tersebut di atas. Hal ini disebabkan, organisasi pemerintah merupakan gabungan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi pemerintah itu sendiri, dengan perilaku yang biasanya diperankan oleh para pejabat organisasi tersebut, dalam bentuk kebijakan.

Namun disadari, mengukur kinerja organisasi publik/pemerintah daerah, memiliki kesulitan, hal ini disebabkan terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik. Hal ini terjadi karena kinerja organisasi sebagai hal yang penting oleh pemerintah (Dwiyanto: 2002:46)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survey deskriptif, yaitu penelitian untuk mencari data seluas mungkin dalam rangka mempelajari kondisi sosial suatu kelompok manusia, hubungan antar manusia dan juga pada kelakuan manusia (Vredernbregt, 1984). Sasaran

penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Brebes, sebanyak 42 SKPD. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang dimaksud dengan kegiatan administrasi dalam konteks ini adalah kegiatan administrasi dalam arti sempit, yaitu proses kegiatan penatausahaan surat-surat dan dokumen, agar dapat secara efisien dan efektif dalam pendaugunaannya. Lingkup kegiatan administrasi dimulai dari proses penerimaan maupun pengeluaran surat-surat atau dokumen-dokumen sampai yang meliputi, pencatatan, pemrosesan, sampai dengan penyimpanan

surat/dokumen. Dengan demikian kegiatan ini akan meliputi sistem dan prosedur kegiatan pemrosesan, transparansi atau keterbukaan, ketepatan waktu pemrosesan, dan sistem penyimpanan surat/dukumen, dan manajemen kantor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja fungsi administrasi umum pada sekretariat Kabupaten Brebes menunjukkan skor persentasenya hanya **56.59 persen**. Ini berarti kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Kabupaten Brebes masih banyak yang harus dibenahi dalam proses penyelenggaraan administrasi umum. Hasil selengkapnya untuk masing-masing indikator dari parameter ini tersaji dalam gambar di bawah ini

Tabel 1. Skor Kinerja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Brebes

No	Parameter	Kinerja %
1	Implementasi prosedur administrasi	47
2	Administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	42
3	Sistem pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip.	64
4	Manajemen kantor dan utility.	70

Sumber: Data Primer Diolah

Deskripsi selanjutnya Untuk lebih lengkapnya skor persentase masing-masing parameter dari kinerja untuk masing-masing parameter akan diuraikan dalam bagian berikut ini

a. Implementasi Prosedur Administrasi

Parameter ini mengukur tentang ketersediaannya pedoman standar waktu

yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelesaian tugas-tugas rutin, yang secara keseluruhan ada 2 indikator.

Dari hasil analisis atas parameter implementasi prosedur administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan, diketahui sebesar 47 persen. Rendahnya skor persentase kinerja administrasi umum tersebut merupakan cermin kemampuan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam

memenuhi indikator-indikator parameter implementasi prosedur administrasi dalam jangka waktu yang ditentukan

Kondisi yang demikian dapat dijelaskan bahwa, secara umum pemerintah Kabupaten Brebes belum mengembangkan standard /target waktu untuk menangani tugas-tugas rutin. Hasil survey dan wawancara terhadap semua SKPD juga ditemukan bahwa hanya ada beberapa SKPD yang telah mengembangkan hal tersebut, namun juga masih dalam kegiatan yang terbatas, yaitu dalam bidang kepegawaian dan dalam bidang keuangan mengenai pencairan anggaran. Namun demikian jenis dokumen yang terkait dengan pencairan anggaran, dan pembuatan laporan, masih bersifat umum dan belum ada pedoman tertulis. Demikian pula dalam Pemrosesan urusan kepegawaian oleh BKD juga hanya memberikan batas waktu tertentu, yang sifatnya umum, dan memberikan persyaratan yang sifatnya formal, sesuai dengan aturan nasional. Kondisi demikian terjadi karena Pemerintah Kabupten belum mengembangkan aturan yang baku mengenai pedoman dan aturan aturan yang ada.

Sedangkan kegiatan lain seperti penanganan surat/dokumen baik yang masuk dan keluar masih dilakukan *by instinc*. Artinya pekerjaan yang dilakukan masih berdasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan, dan belum mendasarkan pada taget waktu yang ditentukan. Belum adanya SOP maupun petunjuk umum sabagai sistem dan prosedur yang tertulis, menjadikan pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak terstandard dalam penanganannya.

b. Administrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Yang dimaksud dengan sistem administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel adalah sistem administrasi yang bebas dari unsur KKN, dapat diakses oleh semua pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa skor persentase kinerja administrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel hanya sebesar 42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administasi yang diterapkan di Kabupten Brebes secara umum masih jauh dari yang diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan '*sistem dan prosedur yang diberlakukan saat ini didasarkan atas aturan yang berlaku secara umum*' baik untuk prosedur kontrak, penerbitan lisensi dan perizinan. Sampai saat ini belum pernah diadakan studi, maupun evaluasi yang komprehensif terhadap proses-proses tersebut. Secara realitas di lapangan, prosedur-prosedur yang telah berjalan dianggap telah mapan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pula kegiatan pendidikan yang secara khusus bagi pegawai, yang membahas tentang pemerintahan yang bersih belum dilakukan. Berdasarkan atas hasil penelitian juga ditemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes belum atau tidak memiliki program pendidikan khusus yang terstruktur untuk para pegawai pemda tentang definisi pemerintahan yang bersih, terutama efek negatif dari KKN.

Gambaran rendahnya capaian parameter kedua di atas juga tidak terlepas dari rendahnya capaian indikator ketiganya, yakni "apakah terdapat prosedur operasi

standar (*Standard Operating Procedure*) untuk menangani pemberian hadiah kepada pegawai pemda oleh suppliers, staf pegawai dan para kontraktor. Mayoritas informan sebesar 89.2 persen menjawab belum ada SOP untuk itu. Ketiadaan SOP tersebut menunjukkan bahwa belum ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Brebes untuk menghilangkan atau meminimalisir kekhawatiran masyarakat pada umumnya mengenai kemungkinan upaya dan pendekatan para suppliers/kontraktor yang bernuansa KKN.

Indikator selanjutnya adalah berkaitan dengan laporan korupsi dan penanganannya. Terhadap indikator atau item pertanyaan tersebut, Sebanyak 15.2 persen informan menjawab tidak; 30.3 persen menjawab dalam kasus tertentu diselidiki dan atau dilaporkan ke penuntut umum; 21.2 persen informan menjawab ya, untuk semua kasus diselidiki tetapi tidak dilaporkan kepenuntut umum; dan 33.3 persen menjawab ya, diselidiki dan dilaporkan untuk semua. Meski persentase terbesar menjawab diselidiki dan dilaporkan untuk semua, namun jawaban yang mengarah pada kekurang sungguhan penanganan laporan korupsi relatif besar. Hal tersebut didukung dengan informasi yang ada, dimana hingga saat ini belum ada laporan korupsi yang sampai kepada penuntut umum. Berdasarkan informasi yang ada, laporan-laporan tentang korupsi yang ada masih dapat diatasi dengan hanya memberikan teguran-teguran, karena temuan yang ada lebih banyak hanya dalam bentuk penyimpangan administratif.

Indikator keenam dari parameter

administrasi yang bersih, transparan dan akuntabel adalah “apakah terdapat daftar biaya yang dikenakan untuk registrasi, permohonan izin, dll, yang dipublikasikan ditempat-tempat penting/lokasi umum atau apakah informasi tersebut dapat diperoleh melalui pamflet/leaflet/selebaran dikantor yang bersangkutan sehingga biaya-biaya pelayanan dipublikasikan dan diketahui oleh masyarakat?”. Untuk indikator ini, sebanyak 36 SKPD yang menjawabnya persentase terbesar (63.3. persen) jawaban informan adalah ada publikasi untuk daftar biaya yang dikenakan untuk registrasi, permohonan izin. Sedangkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan juga belum secara jelas dapat diketahuai secara umum oleh para pemohon surat Izin.

b. Sistem Pengaliran Dokumen Dan Penyimpanan Catatan dan Arsip

Parameter sistem pengaliran dokumen dan penyimpanan catatan dan arsip yang efisien dan efektif diukur dengan menggunakan 3 indikator. Pada indikator pertama Secara umum SKPD belum memiliki standar penanganan kertas kerja, yang berdasarkan penjelasan informan hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kepastian waktu penyelesaiannya.

Demikian pula dengan indikator ke dua, maka diperoleh gambaran bahwa bahwa penyimpanan dokumen di Pemerintah Kabupaten Brebes, sudah dilakukan. Meski demikian, secara umum sistem yang dipakai masih menggunakan sistem yang manual. Untuk beberapa kasus, seperti dokumen yang baru, biasanya mudah untuk dapat segera dicari. Namun untuk dokumen-dokumen yang sudah melebihi batas waktu lama,

proses pencarian dokumen memerlukan waktu yang cukup lama.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pengarsipan di Kabupaten Brebes adalah:

1. Belum adanya sistem digitalisasi dan komputerisasi sistem administrasi kearsipan. Lambannya penerapan sistem ini terkait dengan kurangnya fasilitas komputer dan belum menganggap penting dan mendesak sistem yang demikian. Hal ini dibuktikan dengan minimnya ketersediaan peralatan komputer
2. Secara umum di beberapa SKPD, ruang untuk penyimpanan arsip juga masih kurang memadai. Karena sistem kearsipan yang belum tersistematis, dan masih manual, maka berdampak pada sistem pelacakan sistem pelacakan dokumen, yang masih cara manual

Indikator terakhir dari parameter ketiga adalah menyangkut ada/tidaknya "citizen's charter". Yang dimaksud dengan *citizen charter* adalah dokumen yang menyebutkan hak-hak masyarakat dalam menggunakan pelayanan tertentu atau akses untuk pelayanan tertentu, ternyata sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Brebes belum memiliki dokumen tersebut.

b. Manajemen kantor dan utility.

Yang dimaksud dengan manajemen kantor adalah proses kegiatan pengaturan, penataan dan pengurusan tata ruang dan tata tempat dari suatu kantor untuk mendukung proses kegiatan administrasi.

Kegiatan perkantoran pada instansi pemerintah secara umum belum dilakukan secara baik, dan masih dilakukan secara

konvensional, dan apa adanya. Kurangnya perhatian terhadap penataan kantor menyebabkan suasana kantor sering kurang kondusif untuk sarana bekerja. Sering dijumpai suatu kantor dengan penataan yang kurang sesuai dengan kebutuhan ruang, sempit, berjubel dan tumpukan dokumen yang berserak disetiap meja. Kondisi yang demikian tentu saja akan menjadikan suasana kerja kurang mendukung terhadap kenyamanan..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, untuk beberapa kantor, penempatannya masih belum didasarkan atas kebutuhan ruang yang riil. Kondisi ini menyebabkan penataan ruang kantor kurang memadai. Namun demikian tidak ada yang berani untuk meminta yang lebih baik, karena kondisi secara umum di Kabupaten Brebes memang demikian, Sehingga SKPD cenderung menerima keadaan dengan ruangan kantor seadanya. Keterbatasan ruang dan anggaran untuk pengadaan ruang kantor adalah permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Brebes.

Kedua, Menyangkut kegiatan inventarisasi barang. di Kabupaten Brebes secara umum telah ada mekanisme untuk mengadakan pembaharuan, yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Namun sistem inventarisasi juga masih menggunakan sistem yang manual. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, kegiatan inventarisasi yang dilakukan belum disertai dengan adanya pemeriksaan yang komprehensif terhadap kualitas dan keadaan barang dan perlengkapan yang ada. Model pemeriksaan barang hanya dilakukan berdasarkan perkiraan, yang dilakukan oleh bagian

perlengkapan, yang secara umum para petugasn belum/tidak memiliki keahlian yang memadai sebagai tenaga pemeriksa barang.

Ketiga, Kondisi peralatan kantor, baik kualitas maupun kuantitas terlihat masih kurang memadai. Jumlah yang ada dapat dikatakan baru dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi secara manual dan dalam kondisi yang minimal. Sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan administrasi cepat dan efisien. Sehingga apabila ditanyakan tentang sistem pengaturan untuk barang yang berlebih, maka *kurang ada relevansinya*, karena secara umum, di setiap SKPD masih kekurangan barang perlengkapan.

Keempat, berkenaan dengan indikator "sistem yang komprehensif untuk memeriksa kapan peralatan digunakan, dan oleh siapa, dan bagaimana kondisi umum peralatan tersebut, apakah butuh perbaikan atau tidak". Berdasarkan hasil penelitian ternyata Kontradiksi jawaban tersebut setidaknya menyiratkan masih ada perbedaan antar SKPD dalam hal kesiapan dan penerapan sistem tersebut. Padahal, dengan belum adanya sistem pemeriksaan barang yang komprehensif, maka berdampak pada sistem perencanaan anggaran untuk pemeliharaan yang belum didasarkan atas kondisi riil. Sistem yang dipakai masih berdasarkan pada perkiraan kasar, dan belum menggunakan kebutuhan yang real.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, beberapa permasalahan dalam bidang administrasi umum, adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kinerja administrasi umum pemerintah Kabupaten Brebes masih dikategorikan cukup, yaitu dengan persentase sebesar 56.59 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa, masih banyak permasalahan yang perlu dilakukan pembenahan. Hasil analisis dan inventarisasi permasalahan ditemukan antara lain, *Pertama*, Belum adanya *standard operating prosedur* (SOP) yang dibuat dan ditetapkan sebagai pedoman umum tata administrasi, dan pengurusan dokumen. *Kedua*, Masih terbatasnya perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan administrasi di kantor, sehingga kegiatan sistem pengarsipan masih menggunakan manual. Sistem pengarsipan masih menggunakan model manual dan konvensional. Dalam kondisi tertentu, pencarian dokumen mudah, namun untuk kondisi yang kompleks, pencarian dokumen akan memerlukan waktu yang cukup lama. *Ketiga*, Penatanaan ruang yang masih terkesan apa adanya, disebabkan karena sebagian SKPD masih menepati ruang yang belum memadai. Kondisi tersebut karena kurangnya peninjauan secara komprehensif tentang kebutuhan ruang. Pemerintah Daerah masih kurang peduli dengan kondisi tersebut, *Terakhir*, Untuk pelayanan secara umum juga belum adanya *citizen Charter'* yang memberikan kepastian hak kepada masyarakat yang meminta pelayanan.

Untuk lebih memperbaiki kinerja fungsi administrasi umum, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain, *pertama*, perlu dibangun komitmen yang memadai dari pimpinan daerah dalam bidang tertib administrasi. Dengan adanya komitmen

yang memadai dari pimpinan daerah dalam bidang tertib administrasi. Dengan adanya komitmen maka SOP untuk kegiatan administrasi, dan '*citizen charter*' yang memuat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan, akan mudah untuk dibuat dan dilaksanakan.

Demikian pula Pemerintah Kabupaten perlu memberik perhatian yang serius terhadap masalah perlengkapan kantor dan tata ruangnya, untuk memberikan rasa nyaman dan kondusif bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Callahan, 2003, *Civil Service Reform and Reinvention*, dalam Encyclopedia of Public Administration and Policy, New York. N.Y
- Departemen Dalam Negeri, 2006, *Panduan Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dan Survey Kepuasan Masyarakat*,
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*, MAP UGM dan Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Keban, Yermias, T. 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan 2003, "*Pengukuran Kinerja Instansi pemerintah*"
- , 2003, *Evaluasi Kinerja Pemerintah*,
- Tangkilisan, Hessel Npgi S, 2005, *Penataan Birokrasi Publik Memasuki Era Milenium*, Yayasan Pembinaan Administrasi Publik, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontro Birokrasi Pada era desentralisasi dan otonomi Daerah*, Insan Cendikia Surabaya
- Vrederbregt (1984) *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta